



Daftar Isi:

Algae Biomass & Energy System	1
Sustainable Development Goals (SDGs)	2
Mango Investment & Network	3
Diplomatic Briefing	4
Technical Cooperation	5
Rice Harvest Festival	6
Persiapan Pengiriman Hibah Blueberry	7

Algae Biomass & Energy System

Duta Besar Arifin Tasrif dengan didampingi Atase Pertanian dan Atase Perdagangan melakukan kunjungan ke Algae Biomass & Energy System (ABES), Tsukuba University untuk mendalami teknologi temuan Profesor Makoto M. Watanabe. Toshihide Nakajima, Group Chairman moBiol Holding Pte Ltd, investor bioeconomy yang menggunakan teknologi ABES di Indonesia untuk mengkonversi palm oil mill effluent (POME) menjadi docosahexaenoic acid (DHA) guna mengurangi biological oxygen demand (BOD), sehingga dapat dibuang ke sungai sebagai air bersih, hadir bersama tim dari Marubeni untuk Asia & Oceania Team, Regional Coordination & Administration, Satoshi Kagaya dan Ryotaro Furuki.

“Kami kembangkan alga jenis *Borriococcus braunii*, *Aurantiochytrium*, dan Native algae untuk pengolahan limbah organik menjadi DHA. Selain ramah lingkungan, komponen alga sangat bermanfaat untuk dikomersialkan. Produk alga hasil pengembangan kami antara lain bahan bakar cair, padat, dan gas berupa hydrogen dan metana, produk alternatif bahan galian seperti plastik dan karet fungsional, makanan dan bahan pangan fungsional, obat-obatan, zat pewarna, anti oksidan, pakan, pupuk, zat pengatur tumbuh tanaman, serta insektisida nabati” terang Watanabe mengawali paparannya.

“Indonesia produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun POME menimbulkan masalah karena emisi gas metana yang dihasilkan, sehingga memperburuk dampak pemanasan global. Dengan menggunakan teknologi ABES, maka tidak saja emisi gas metana yang akan direduksi, melainkan juga akan tercipta industri hasil dari inovasi, tersedia bahan pangan alternatif, terevitalisasi sumber air bersih, sehingga mendukung kapasitas wilayah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai bentuk pencapaian hasil kerjasama kemitraan. Dengan kata lain, teknologi ABES ini akan mendukung Indonesia mencapai 5 dari 17 Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030” tutur Watanabe lebih lanjut.

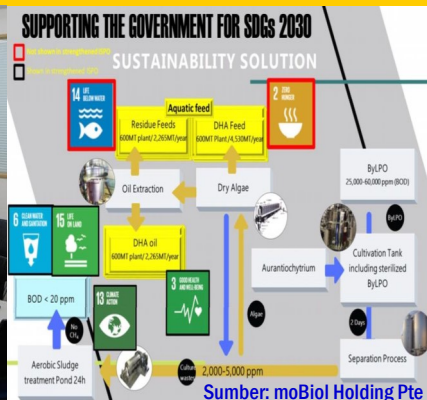
“Teknologi ABES ini sangat penting bagi Indonesia dalam mendukung industri berbasis kelapa sawit yang berkelanjutan. Selain ramah lingkungan, banyak nilai tambah yang diciptakan dari hasil pengolahan POME. Bagaimana dengan pasar bahan pangan khususnya DHA dan pakan hasil pengolahan limbah kelapa sawit ini?” tanya Arifin antusias.

“Kami dari Marubeni siap membeli DHA produksi hasil pengolahan POME di Indonesia. Selain lebih murah dibandingkan DHA yang dikandung minyak ikan, aroma alga yang alami menarik minat industri farmasi. Selama ini bau amis minyak ikan menjadi tantangan tersendiri bagi industri farmasi untuk menjual minyak ikan yang kaya akan DHA” sahut Kagaya.

“Kami berharap moBiol akan aktif memasyarakatkan teknologi ABES di Indonesia dan bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian serta lembaga penelitian lain di Indonesia, sehingga memberi solusi untuk memproduksi energi terbarukan yang ramah lingkungan, mendukung industri kelapa sawit dengan sertifikat ISPO, mengkonservasi sumberdaya air bersih, serta menyediakan bahan pangan dan pakan alternatif yang sehat dengan harga terjangkau” pungkas Arifin di akhir pertemuan.

Sebagai tindak lanjut kunjungan Duta Besar, Group Chairman moBiol Holding Pte Ltd dijadwalkan untuk memaparkan teknologi ABES di Badan Litbang Pertanian, Jakarta pada tanggal 29 November 2019.

Tsukuba, 3 Oktober 2019.



Sumber: moBiol Holding Pte Ltd

Sustainable Development Goals (SDGs)

Istilah sustainable development goals (SDGs) sering disebut dan dibahas di kalangan teknokrat, akademisi, dan ilmuwan. Namun tidak sedikit yang telah memahami mekanisme SDGs secara menyeluruh. Berbicara tentang SDGs, menarik dikaitkan dengan kelapa sawit. Dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil, maka bahan bakar baru dan terbarukan menjadi alternatif dalam pemenuhan energi di dunia. Namun, muncul permasalahan baru, manakala bahan bakar terbarukan tersebut berasal dari bahan baku pangan (feed) atau pakan (feed), sehingga dikhawatirkan menimbulkan persaingan dalam penggunaannya sebagai bahan bakar (fuel) atau bahkan pupuk (fertilizer). Biomassa kelapa sawit merupakan sumberdaya alam yang melimpah di Indonesia. Penggunaan biomassa kelapa sawit sebagai bahan bakar meningkat sejak cadangan bahan bakar fosil mulai mengemuka di dunia. Merujuk SDGs, penggunaan biomassa kelapa sawit pun harus sejalan dengan pencapaian 17 tujuan yang memenuhi delapan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Improvement of business sustainability merupakan satu dari delapan prinsip yang banyak dituntut oleh pasar produk kelapa sawit. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, yaitu tujuan #12. Apabila kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan bakar, maka pasar khawatir akan terjadinya kompetisi penggunaan kelapa sawit sebagai pangan, pakan, bahan bakar dan pupuk, sehingga menimbulkan kerawanan ketersediaan yang berakibat pada gejolak harga di pasar. Oleh karena itu, prinsip sustainability menjadi penting bagi industri kelapa sawit.

Environmental management, merupakan prinsip penting kedua yang menjadi tuntutan pasar komoditas, termasuk kelapa sawit. Fenomena pemanasan global akibat aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca menjadi perhatian dunia, sehingga dengan prinsip tersebut SDGs berupaya mencapai tujuan #6, #7, #12, #13, #15, dan #16. Kelapa sawit Indonesia menghadapi banyak tantangan di pasar akibat kampanye para penggiat lingkungan yang menuding kelapa sawit sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca mulai dari kegiatan budidaya hingga pengolahannya.

Dalam ekonomi terbuka dan sistem perdagangan global, dianut prinsip keterlacakan, di mana SDGs mengadopsi sebagai prinsip supply chain traceability and transparency. Setiap komoditas yang diperdagangkan harus dapat dilacak sampai asal tempat dibudidayakan. Apabila timbul masalah dalam perdagangannya dapat diketahui penanggung jawab komoditas yang bersangkutan. Pasar produk kelapa sawit menuntut hal yang sama untuk seluruh biomassa yang diperdagangkan, sehingga perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani, perusahaan swasta maupun perusahaan negara perlu mengikuti sistem sertifikasi produk yang berlaku, yaitu ISPO. Tujuannya untuk mencapai tiga tujuan SDGs, yaitu tujuan #10, #12, dan #16.

Lima prinsip yang lain, yaitu pertama farming business legality diarahkan untuk mencapai tujuan #1, #8, #10, #12, #15, dan #16. Kedua, prinsip farming management yang diarahkan untuk mencapai tujuan #6, #8, #12, #13, #15, dan #16. Ketiga, prinsip protection on primary natural forests and peat lands yang diharapkan mendukung pencapaian tujuan #13 dan #15. Keempat, prinsip responsibility for labors ditetapkan untuk mencapai tujuan #1, #5, #8, dan #10. Kelima, prinsip social responsibility and community economy empowerment yang digadang-gadang dapat menggiring pada pencapaian tujuan #3, #4, #8, dan #16.

Saat ini, produk kelapa sawit Indonesia dengan pada sertifikat ISPO belum dapat diterima di pasar Jepang karena dinilai belum memenuhi kriteria keberlanjutan dari aspek lingkungan, ketenagakerjaan, kompetisi pangan-bahan bakar dan pupuk, serta keterlacakan dan keterbukaan terhadap publik. Kehadiran teknologi ABES diharapkan dapat mendukung pencapaian Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit, sehingga ke depan produk kelapa sawit dengan sertifikat ISPO dapat diterima pasar secara global.

Mango Investment & Network

Menindaklanjuti rencana investasi vapour heat treatment (VHT) guna mendukung proses pencabutan larangan impor buah mangga segar dari Indonesia ke Jepang, Atase Pertanian mempertemukan calon investor VHT, Chandra Deddy Purnama, Direktur Purnama Group dengan Fukuda Satoshi, CEO Gourmet Trading Company yang telah berpengalaman dalam bisnis impor produk hortikultura segar di Jepang. Hadir pada B2B meeting tersebut Celia Dulkenan, personal trader yang akan bermitra dengan Gourmet Trading Company untuk mengimpor buah mangga dan buah tropis lainnya dari Indonesia.

“Kami telah mengimpor buah dan sayuran serta mendistribusikan ke wholesaler, supplier supermarket dan retailer di Jepang. Perijinan produk segar memang rumit dan panjang. Kami perlu waktu untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu 3-5 tahun. Produk segar yang telah kami impor antara lain blueberry, kiwi, paprika, mangga, dan pisang” tutur Fukuda mengawali diskusi.

“Pembeli kami adalah kelompok pedagang, sehingga mereka perlu memastikan produk yang kami tawarkan diminati konsumennya. Oleh karena itu, perlu contoh produk untuk kami sampaikan kepada calon pembeli di Jepang” sahut Celia.

“Impor buah mangga segar dari Indonesia masih dilarang, maka kami kesulitan untuk memenuhi permintaan pengiriman contoh produk. Mengundang calon pembeli ke Indonesia relatif lebih sulit dibandingkan mengirim contoh produk. Oleh karena itu kami minta alternatif cara penyampaian contoh buah agar kualitas rasa dan penampakan buah mangga tersebut dapat diterima oleh calon pembeli” tukas Deddy.

“Buah mangga dapat dikirim dalam keadaan beku, sehingga tidak mengubah citarasa aslinya. Kami rekomendasikan untuk menggunakan Individual Quick Freezing (IQF). Hal ini biasa dilakukan calon eksportir buah yang selama ini menjalin kerjasama dengan kami. Pada tahap ini perlu lima kilogram buah mangga untuk kami sampaikan kepada calon pembeli. Seyogyanya contoh buah tiba sebelum Maret 2020, agar kami dapat sampaikan umpan balik dari para pembeli pada saat berlangsung Food Expo 10–13 Maret 2020” terang Fukuda.

“Terima kasih atas saran dan rencana tindak lanjut dari pertemuan ini. President Director perusahaan akan hadir ke Tokyo dan kami akan laporkan hasil pertemuan ini serta mempelajari teknologi IQF yang direkomendasikan untuk pengiriman contoh buah mangga” pungkas Deddy mengakhiri B2B meeting.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, President Director Sunbiz City, salah satu perusahaan dari Purnama Group, Moch Turino Junaedy menyampaikan harapannya kepada Atase Pertanian untuk memperoleh mitra dagang dan investasi di Jepang guna merealisasikan rencana investasi mendukung ekspor mangga dan produk pertanian lain dari Indonesia serta membangun pasar ekspor di Jepang.



“Kami berharap dapat mempunyai mitra usaha asal Jepang, sebagai mitra dagang mengimpor mangga dan produk pertanian lain asal Indonesia serta sebagai mitra investasi untuk mengeksport lebih lanjut produk-produk tersebut ke negara lain di luar Jepang. Dengan kata lain, kami bekerja sama dengan mitra untuk membuka pasar ekspor cabang Jepang” terang Junaedy.

“Investor Jepang di Indonesia tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda). Kami akan mengkomunikasikan dengan Executive Director untuk mengagendakan pertemuan” sambut Nuryanti.

Pada tanggal 15 November 2019 dengan didampingi Atase Pertanian, Direktur Purnama Group melakukan courtesy call kepada Executive Director Japinda, Norio Yamazaki. Tertarik dengan proposal kerjasama yang diajukan, Japinda meminta President Director Sunbiz City dan Purnama Group untuk memaparkan rencana kerjasama dan investasi dengan anggota Japinda pada tanggal 18 November 2019 di sela-sela Annual Courtesy Visit Japinda kepada Presiden RI di Jakarta.

Tokyo, 7, 14, & 15 Oktober 2019.



Technical Cooperation

Banyak jenis organisasi dan kelompok, termasuk pemerintah sebagaimana organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta melakukan pendampingan keuangan bagi negara berkembang untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Official Development Assistance (ODA) merupakan salah satu bentuk pendampingan yang didefinisikan oleh Komite Pendampingan Pembangunan (Development Assistance Committee, DAC) di bawah the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai berikut, (i) harus dilakukan oleh pemerintah atau badan pemerintah, (ii) bertujuan utama untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di negara berkembang, dan (iii) mempunyai ketentuan yang lunak, yaitu mengandung unsur bantuan paling sedikit 25 persen. ODA dapat berupa bantuan bilateral yang diberikan sebagai pendampingan langsung kepada negara berkembang atau bantuan multilateral yang diberikan melalui organisasi internasional.

Pemerintah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan bilateral dalam bentuk Technical Cooperation, Loans dan Grant Aid. Sejak bergabung menjadi anggota Group of 20 (G20), Indonesia tergolong sebagai negara maju, sehingga sesuai tujuan ODA, Indonesia tidak berhak lagi memperoleh ODA dalam bentuk grant aid, namun berupa technical cooperation dan loans saja. Meskipun demikian, Jepang tetap memberi perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian, khususnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pertanian, sehingga melalui JICA Jepang memberikan technical cooperation kepada petani di Jawa Barat untuk menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas baik dan berharga premium, sehingga tercipta niche market untuk produk tersebut. Guna menginisiasi rencana tersebut, tim JICA yang terdiri dari Deputy Executive Director of Department of Rural Development, Kazuya Suzuki dan Assistant Director, Togo Chisa hadir bersama Gen Fujii dari ODA Department untuk bertemu dengan Atase Pertanian.

“Success story program magang Jepang asal Indonesia kami peroleh dari perwakilan JICA di Indonesia. Harapan Jepang, teknologi pertanian yang dipelajari selama magang dimanfaatkan di Indonesia. Oleh karena itu, kami memerlukan beberapa informasi tentang seleksi, pelatihan, keberangkatan, mitra kerjasama program magang, dan umpan balik bagi alumni oleh Kementerian Pertanian setelah kembali dari Jepang” tutur Suzuki memulai diskusi.

“Magang Jepang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Setiap tahun Puslatan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) magang ini di Jepang. Pada tanggal 2–6 November 2019 nanti, Kepala Puslatan akan melakukan kegiatan monev. Tentang seleksi, pelatihan, keberangkatan dan umpan balik dan umpan akan sangat tepat apabila diperoleh langsung dari penyelenggara. Saat ini kami akan jawab siapa saja mitra kerjasama program magang di Jepang ini. Kami bekerja sama dengan asosiasi dan perusahaan untuk menyelenggarakan magang, antara lain Japan Agricultural Exchange Council (JAEC), Niigata Agricultural Exchange Council (NAEC), International Agricultural Exchange Association (IAEA) Prefecture Gunma, dan Ibaraki Chuo Engei (ICE). Belum lama ini telah ditandatangani nota kesepahaman baru kerjasama magang dengan Toshi Fusao Yuji (TFY) dan dalam waktu dekat akan ditandatangani nota kesepahaman kerjasama magang dengan Pemerintah Kota Yokote, Prefecture Akita” terang Nuryanti.

“Magang Jepang ini sepertinya demikian menarik bagi petani Indonesia. JICA ingin membuat dampak positif kepada alumni magang Jepang dengan membuat kegiatan kerjasama dalam kegiatan ODA kami. Saat ini telah berjalan technical cooperation fase satu untuk petani hortikultura di Jawa Barat. Pada tahun 2020, kami berencana melanjutkan fase dua dan masih di Jawa Barat khusus untuk alumni magang Jepang” sahut Togo.

“Technical cooperation fase satu telah berhasil mendorong petani menghasilkan 60 jenis sayuran Jepang dan telah diterima di supermarket modern serta supermarket yang khusus menjual produk-produk Jepang dengan harga premium. Capaian ini merupakan indikasi bahwa alih teknologi yang kami lakukan telah berhasil meningkatkan kualitas dan juga harga produk pertanian yang dibudidayakan petani yang kami bina mulai dari nol. Melihat banyaknya alumni magang yang telah menguasai teknologi pertanian standar Jepang, maka kami berencana untuk melakukan technical cooperation fase dua yang selangkah lebih maju, yaitu lebih fokus pada pengembangan niche market” tugas Fujii.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, tim JICA diagendakan untuk bertemu dengan Kepala Puslatan pada tanggal 6 November 2019 guna memperoleh penjelasan tentang magang Jepang dan mendiskusikan lebih lanjut skema technical cooperation yang akan diberikan kepada alumni magang Jepang di Jawa Barat.

Tokyo, 10 Oktober 2019.

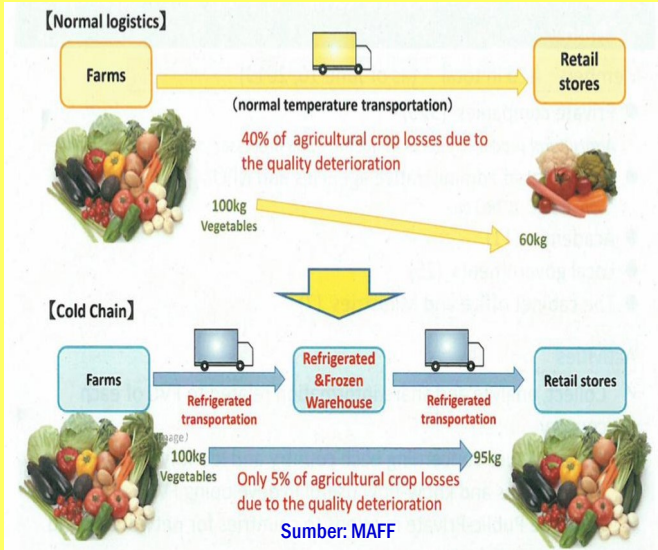


Diplomatic Briefing

International Department, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) menggelar diplomatic briefing dengan mengundang para diplomat dari kedutaan besar negara sahabat di Jepang. Acara tersebut rutin digelar setiap semester untuk menyampaikan kegiatan yang dapat dikerjasamakan atau perkembangan dari isu di sektor pertanian yang sedang dihadapi Jepang. Atase Pertanian hadir bersama dengan 41 diplomat lain untuk memperoleh penjelasan termutakhir tentang sektor pertanian di Jepang.

“Hari ini merupakan diplomatic briefing pertama yang kami lakukan pada tahun fiskal Reiwa 1. Keterbukaan pasar global telah menimbulkan keterkaitan satu negara dengan negara yang lain. Pangan menjadi bagian dalam pasar dunia, sehingga standar keamanan pangan menjadi penting untuk diterapkan. Suatu negara tidak akan mampu memenuhi seluruh bahan pangan bagi penduduknya, demikian juga dengan Jepang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tiga narasumber akan memaparkan tiga hal. Yang pertama Promotion of food value chain (FVC) development, yang kedua head quarter for agricultural products and food export policy, dan ketiga the food safety control for radionuclides in Japan” terang Takashi Hiranaka, Director for Bilateral Affairs Division, International Affairs Department, MAFF pada sambutan pembukaan.

“Saat ini Jepang giat mempromosikan aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap tahap produksi dan konsumsi produk pertanian, sehingga memberi manfaat kepada banyak pihak yang berkepentingan. Perhatian kepada FVC belakangan muncul di negara berkembang. Jepang dengan teknologi yang dikuasai siap dan membuka diri kepada negara sahabat untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan menggandeng perusahaan yang berminat menjalin kerjasama dengan perusahaan di Jepang. Hal ini merupakan bagian dari strategi pengembangan global FVC yang kami lakukan, yaitu mengkombinasikan bilateral policy dialogue dengan aktivitas public-private council, sehingga tercapai win-win solution bagi seluruh pemangku kepentingan FVC. Kami bekerja sama dengan public private council yang beranggotakan 323 perusahaan swasta, 54 organisasi nirlaba, 11 akademi, 25 pemerintah daerah, dan 7 kementerian. Kami telah berhasil menjembatani India untuk mendorong koperasi peternakan menghasilkan telur omega, mendukung Kamboja dalam mengembangkan snack lokal berbahan baku beras, serta memfasilitasi Rusia memperoleh kontrak penangkapan ikan laut di perairan Vlavostok” urai Shigefumi Kikuchi, Deputy Director for Overseas and Cooperation Division.



“Memperhatikan pentingnya FVC dalam memberi manfaat positif bagi para pemangku kepentingan di setiap tahapan proses, tampak bahwa pertanian merupakan faktor kunci dalam merevitalisasi suatu wilayah. Permasalahan yang dihadapi pertanian Jepang adalah penduduk yang makin menurun, sehingga permintaan atas produk pangan dan pertanian pun terus menurun. Promosi FVC yang dilakukan Jepang pun pada prinsipnya untuk mempromosikan teknologi dan produk pertanian Jepang ke pasar global. Tantangan yang dihadapi Jepang untuk membuka pasar ekspor yang pertama adalah birokrasi. Hal ini adalah permasalahan umum yang dihadapi di berbagai negara, di mana prosedur ekspor harus ditempuh melalui berbagai kementerian dan lembaga hingga ekspor terealisasi. Kedua, kekurangan sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas khusus dan ahli di bidangnya yang berdampak pada kelambatan prosedur ekspor yang harus ditempuh. MAFF membentuk Head Quarter for Agricultural Product and Food Export Policy untuk mengatasi kedua tantangan tersebut. Selain itu, MAFF juga membentuk badan akreditasi yang kompeten untuk melakukan sertifikasi fasilitas ekspor. Yang tidak kalah penting, MAFF secara aktif berkolaborasi dan bernegosiasi dengan mitra runding untuk mencapai target ekspor” papar Naoko Udagawa, Deputy Director for Special Task Force Export Promotion Division.

Maximum levels of radio-caesium in food

		Codex	Japan	EU (European 2016/52)	US
Annual additional radiation dose		1 mSv	1 mSv	1 mSv	5 mSv
Assumed ratio of contaminated food		10 %	50 %	10 %	30 %
Maximum levels of radio-caesium in food	Drinking water		10 Bq/kg	1,000 Bq/kg (or liquid food)	
	Milk		50 Bq/kg	1,000 Bq/kg (Dairy product)	
	Infant food	1,000 Bq/kg	50 Bq/kg	400 Bq/kg	
	Other than the above food	1,000 Bq/kg	100 Bq/kg (General food)	1,250 Bq/kg	1,200 Bq/kg (All food)
		Food consumed in small quantities† 10,000 Bq/kg		Minor food 12,500 Bq/kg	

† For food consumed in small quantities that represent a small percentage of total diet and hence a small addition to the total dose, the Codex Guideline Levels may be increased by a factor of 10. (Called 'minor food' in EU).

Note: The Japanese maximum levels of radioactive caesium in food are set also in consideration of other radionuclides released by the accident namely ⁹⁰Sr, ¹⁰⁶Ru, ²³⁸Pu, ²³⁹Pu, ²⁴⁰Pu and ²⁴¹Pu. Sumber: MAFF

“Sejak kebocoran reaktor nuklir Fukushima pada tahun 2011, isu keamanan produk pertanian dan pangan asal Jepang menjadi sorotan di berbagai belahan dunia. Kami bekerja keras mengatasi dampak kebocoran dan secara aktif mensosialisasikan perkembangan keadaan di Fukushima kepada dunia. MAFF bekerja sama dengan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) menerapkan sistem pemantauan cemaran radioaktif pada bahan pangan sesuai Food Sanitation Act yang berlaku. Apabila bahan pangan mengandung cemaran radioaktif melebihi kadar yang diijinkan, maka harus dimusnahkan karena tidak layak untuk dikonsumsi apalagi diperdagangkan. Sistem pemantauan cemaran radioaktif ini juga kami lakukan pada bahan pangan yang diimpor masuk ke wilayah Jepang melalui metoda sampling yang merujuk Codex. Tujuannya untuk menjamin keamanan pangan. Saat ini, dari 54 negara yang menerapkan pembatasan impor produk pangan asal Jepang akibat kebocoran reaktor nuklir Fukushima, 32 di antaranya telah menghapus pembatasan tersebut. Jepang menetapkan standar keamanan pangan yang tinggi, sehingga Jepang pun menjamin produk pertanian dan pangan yang kami ekspor telah memenuhi standar pangan tersebut” tegas Kazunari Morii, Director for Office for Overseas' Import Regulations, Export Promotion Division di akhir briefing.

Tokyo, 16 Oktober 2019.

Rice Harvest Festival

Setelah absen pada rice planting festival, Atase Pertanian memenuhi undangan dari Masao Watanabe, Chairman of the Executive Committee for Fujisan Chidama Festa untuk menghadiri rice harvest festival di Fujiyoshida-shi, Yamanashi Prefecture, Japan. Harvest festival sendiri dalam Bahasa Jepang dikenal dengan istilah Koshogatsu, yang secara harfiah berarti "Tahun Baru Kecil" yang dirayakan dengan ritual doa untuk memohon jumlah panen yang cukup.

Harvest festival ini tidak saja dihadiri oleh para diplomat dari negara sahabat di Jepang, namun juga masyarakat umum yang turut merayakan kegembiraan atas hasil panen pada musim Reiwa 1. Acara dimulai dengan upacara dan doa yang dipimpin oleh chairman lalu dilanjutkan doa persembahkan dari para diplomat yang hadir.

Festival tanam dan panen merupakan kearifan lokal yang masih dipupuk dan dilestarikan Jepang, sebuah negara maju dan telah mulai memperkenalkan teknologi era industri era 6,0. Masyarakat Jepang meyakini bahwa setiap bulir gabah yang ditanam dan butiran beras yang dimakan merupakan anugerah dewa atas kerja keras para petani dan cerminan kebaikan yang telah ditanam. Oleh karena itu, ritual dan doa yang dipersembahkan kepada dewa merupakan perwujudan syukur kepada dewa, melainkan juga ungkapan terima kasih kepada petani.

"Masyarakat Jepang memiliki perasaan khusus terhadap festival tradisional atau matsuri dan telah menjadi agenda rutin di seluruh negeri. Banyak dari festival ini memiliki hubungan dekat dengan waktu tertentu dalam setahun, seperti penanaman padi secara seremonial di musim semi dan ritual untuk menangkal epidemi, topan, dan hama pertanian selama musim panas. Panen musim gugur kami lakukan sebagai festival ucapan syukur, sementara festival musim dingin kami lakukan untuk memurnikan diri sebelum akhir tahun serta untuk menjaga semangat dan hangat selama menghadapi cuaca dingin. Matsuri semacam ini merupakan gambaran rasa orang Jepang terhadap perubahan musim" urai Yonenaga Harunobu, Ambassador for public relation of Yamanashi Prefecture dalam sambutannya.

"Kami berharap akan sukses panen di musim semi, bersyukur di musim gugur, dan bekerja keras di musim semi dengan menanam sawah yang kami rayakan dengan Otaue Matsuri atau festival penanaman sawah" imbuh Harunobu.

"Kalau di Jepang dikenal dengan Koshogatsu, kami di Indonesia menyebut harvest festival semacam ini dengan tradisi wiwit. Beberapa daerah masih melaksanakan tradisi wiwit untuk memulai panen padi. Wiwit ini merupakan upacara untuk memuja dan mengucapkan terima kasih kepada Dewi Padi yang bernama Dewi Sri" terang Nuryanti saat mendapat giliran untuk berbagi cerita tentang tradisi lokal.

Yamanashi, 20 Oktober 2019.



Persiapan Pengiriman Hibah Blueberry

Dengan terbitnya Surat Pemberian Izin Pemasukan (SIP) Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura untuk PT Saribhakti Bumi Agri (SBA) pada tanggal 16 Juli 2019, Atase Pertanian melakukan fasilitasi tindak lanjut rencana hibah bibit tanaman blueberry dari Pemerintah Kisarazu, Prefecture Chiba, Jepang. Komunikasi dan koordinasi persiapan dokumen dan logistik pun dilakukan kedua pihak, Indonesia dan Jepang.

Pada tanggal 7 Agustus 2019 Atase Pertanian menyampaikan Brafaks nomor B-00321/Tokyo/190807 tentang Rencana Penyampaian Hibah 400 Batang Bibit Blueberry dari Kota Kisarazu dan Mesin Dileka dari Iluka College Co Ltd dan telah memperoleh dua tanggapan. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menanggapi dengan surat nomor S-429/BC.05/2019 yang ditujukan kepada Duta Besar RI di Tokyo yang meminta kepada PT SBA untuk mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bibit blueberry kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI. Dengan antusias, pada tanggal 24 Oktober 2019 Direktur Utama PT SBA melayangkan surat nomor 002/FIN.SBA/X/2019 untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor bibit blueberry.

Pada tanggal 7 Oktober 2019, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian menyampaikan kepada surat Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri dengan nomor B.2976/KL.010/A.6/10/2019 yang berisi Penyampaian Draft Grant Agreement Hibah Bibit Tanaman Blueberry dari Jepang. Pada hari yang sama, Atase Pertanian menyampaikan Draft Grant Agreement kepada Pemerintah Kota Kisarazu. Selanjutnya, Pemerintah Kota Kisarazu bertemu dengan Atase Pertanian untuk membahas persiapan pengiriman hibah pada tanggal 24 Oktober 2019.

“Pemerintah Kota Kisarazu secara prinsip setuju dengan Draft Grant Agreement yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Kami akan menyiapkan salinan Agreement Hibah Bibit Tanaman Blueberry dalam Bahasa Jepang dengan penafsiran yang sama dengan naskah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. Setelah ditandatangani Walikota kami akan sampaikan kepada Atase Pertanian bersama Gift Certificate/Donation Certificate untuk melengkapi dokumen pendaftaran hibah di Indonesia” terang Hirota Nomura, Section Chief of Agriculture, Forestry and Fisheries Division, Economic Department, Kisarazu City.



“Pemerintah Kota Kisarazu akan melakukan pengepakan bersama Sadao Ezawa pada tanggal 22 November 2019. Kami akan membuat dokumentasi hibah sebagai dokumen pengantar yang diperlukan saat pengiriman nanti” imbuh Kazunori Tahara, Section Chief of Planning Division, Planning Department, Kisarazu city.



“Kami akan hadir saat pengepakan dilakukan dan saat pemeriksaan di Yokohama Plant Quarantine Office untuk memperoleh phytosanitary certificate” sahut Nuryanti.

“Sadao Ezawa berpesan untuk mengkonfirmasi tentang penggunaan peat moss sebagai penutup akar karena jika menggunakan kertas kelembaban akar hanya akan bertahan selama lima hari” tanya Nomura lebih lanjut.

“Petugas karantina pertanian di Soekarno Hatta International Airport dan maskapai Garuda yang akan mengangkut bibit mengijinkan penggunaan peat moss yang bersih dari tanah dan bahan yang lain untuk pengepakan bibit blueberry. Dokumen pengantar hibah yang telah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat dan maskapai Garuda baru SIP. Masih diperlukan phytosanitary certificate yang akan diterbitkan pada tanggal pengiriman hibah nanti” jawab Nuryanti.

“Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang dilakukan kepada Pemerintah Kota Kisarazu untuk merealisasi rencana hibah ini. Harapan kami, blueberry dapat disampaikan tepat waktu dan pada akhirnya dapat tumbuh dengan baik di Indonesia, sehingga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman blueberry” pungkas Nomura di penghujung pertemuan.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Grant Agreement dan Gift Certificate telah ditandatangani oleh Walikota Kisarazu, Yoshikuni Watanabe untuk selanjutnya dapat disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian guna didaftarkan sebagai hibah di Kementerian Keuangan RI. Sehubungan dengan rotasi pesawat, maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA 875 batal terbang pada tanggal 25 November 2019. Mempertimbangkan diperlukannya waktu sepuluh hari pemeriksaan karantina sebelum bibit tanaman dapat dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2019 untuk dapat diserahkan oleh Pemkot Kisarazu kepada Pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 2019, maka Atase Pertanian akan melakukan pengiriman hibah bibit tanaman blueberry pada tanggal 23 November 2019.

Tokyo, 24 Oktober 2019.